

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashiddiqe, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., Jakarta, 2006.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, edisi VI*, West Publishing, St. Paul, 1990.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Farid, Zainal Abidin *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hamid, Edi Suandi, dan Muhammad Sayuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- Hamzah, Andi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- _____, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

- Kencana, Inu dan Azhari Syafiie, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Lotulung, Paulus Efendie, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, , Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Irfan Nur Rachman et al., *Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK], Jakarta, 2016.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2009.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Suganda, Azis, *Kekuasaan Badan Eksekutif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.
- Sulista, Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1984.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana DI Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

JURNAL

Fatovic, C., "Constitutionalism and presidential prerogative: Jeffersonian and Hamiltonian perspective", *American Journal of Political Science*, 2004.

Huda, Ni'matuI, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 18 Vol. 8. Oktober 2001.

Lestaluhu, Kayum, "Eksistensi Grasi Dalam Hukum Pidana Nasional", *Legal Pluralism*, Vol 7, No 1, Januari 2017.

Reinstein, Robert J., "The Limits of Executive Power", *American University Law Review*, Vol 59 No. 259, 2009.

Waluyo, Bambang, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 2, Desember 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-444/E/Ep1/9/1993